



## Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Mitigasi Risiko Keuangan *The Role of Corporate Governance in Mitigating Financial Risk*

Sabrina Dewi Hasna

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon-Indonesia

Korespondensi penulis : [sabrinadewihasna@gmail.com](mailto:sabrinadewihasna@gmail.com)

**Abstract:** *This study discusses how corporate governance (Good Corporate Governance/GCG) plays a role in reducing and controlling financial risk in an organization. Financial risk is an inseparable aspect of business activities, especially when companies face unstable and challenging market conditions. Therefore, a governance system is needed that can help companies recognize potential risks early on, as well as set appropriate handling strategies to minimize their impact on business continuity. The method used in this study is a literature study, namely by collecting secondary data from scientific journals and trusted articles that are relevant to the topic. The discussion includes theoretical foundations related to GCG principles, corporate governance structures, and financial risk mitigation steps. In addition, the role of the government in providing regulatory support is also discussed as part of the external factors that affect the effectiveness of corporate governance. From the results of the analysis, it is known that the application of GCG principles such as transparency, accountability, and responsibility has a major influence on the company's resilience in facing financial risks. A clear organizational structure and strong supervision allow companies to manage risks systematically. In other words, GCG makes a real contribution to strengthening a sustainable and adaptive risk management system to changes in the business environment.*

**Keywords:** *Corporate Governance, Financial Risk, Regulatory Compliance, Risk Management, Risk Mitigation.*

**Abstrak :** Penelitian ini membahas bagaimana tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) berperan dalam mengurangi dan mengendalikan risiko keuangan dalam suatu organisasi. Risiko keuangan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bisnis, terutama ketika perusahaan menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil dan penuh tantangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola yang mampu membantu perusahaan mengenali potensi risiko sejak awal, serta mengatur strategi penanganan yang tepat guna meminimalisasi dampaknya terhadap kelangsungan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah dan artikel terpercaya yang relevan dengan topik. Pembahasan meliputi landasan teori terkait prinsip GCG, struktur tata kelola perusahaan, serta langkah-langkah mitigasi risiko keuangan. Selain itu, peran pemerintah dalam memberikan dukungan regulasi juga turut dibahas sebagai bagian dari faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan. Dari hasil analisis, diketahui bahwa penerapan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko keuangan. Struktur organisasi yang jelas dan pengawasan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko secara sistematis. Dengan kata lain, GCG memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem manajemen risiko yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha.

**Kata Kunci :** Tata Kelola Perusahaan, Risiko Keuangan, Manajemen Risiko, Mitigasi Risiko, Kepatuhan Regulasi.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tidak lepas dari berbagai bentuk risiko, terutama risiko keuangan yang memiliki potensi besar untuk mengganggu stabilitas dan kelangsungan operasional. Risiko keuangan dapat muncul dari berbagai sumber seperti fluktuasi pasar, perubahan kebijakan ekonomi, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi, serta kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan. Jika tidak diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik, risiko-risiko ini dapat menyebabkan kerugian signifikan, menurunnya kepercayaan investor, hingga

kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk mencegah, mengelola, dan meminimalkan risiko keuangan, salah satunya melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Tata kelola perusahaan berperan sebagai sistem pengaturan dan pengendalian yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan, seperti manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten akan memperkuat sistem pengawasan internal dan membentuk budaya organisasi yang sehat, sehingga mampu memitigasi berbagai jenis risiko keuangan secara lebih efektif.

Dalam konteks manajemen risiko, GCG menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko-risiko keuangan secara tepat. Misalnya, melalui peran komite audit dan unit manajemen risiko yang bekerja secara independen, perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan dampak finansial. Selain itu, keberadaan dewan komisaris yang aktif dalam mengawasi jalannya perusahaan juga menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa risiko keuangan tidak diabaikan atau disembunyikan oleh pihak manajemen.

Beberapa mekanisme tata kelola yang terbukti efektif dalam mitigasi risiko keuangan antara lain adalah penerapan sistem audit internal yang ketat, transparansi laporan keuangan, dan pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi. Misalnya, dengan adanya audit internal yang berkelanjutan, perusahaan dapat mengidentifikasi celah-celah dalam sistem keuangannya yang berpotensi menimbulkan kerugian. Di sisi lain, keterbukaan informasi keuangan yang disampaikan secara jujur dan tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkecil peluang terjadinya manipulasi data.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kompleksitas dunia bisnis dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang tidak memiliki sistem tata kelola yang kuat akan lebih rentan terhadap risiko keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tata kelola perusahaan dapat dioptimalkan sebagai instrumen mitigasi risiko yang strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara penerapan tata kelola perusahaan dan efektivitasnya dalam mengurangi risiko keuangan. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji teori, hasil studi

sebelumnya, serta praktik-praktik terbaik yang relevan. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang manajemen risiko serta menjadi referensi bagi pelaku bisnis untuk memperkuat sistem pengelolaan risikonya melalui penerapan GCG yang baik dan berkelanjutan.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Dalam penelitian ini, dua konsep utama yang dibahas adalah tata kelola Perusahaan dan risiko keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian dan teori yang mendasari kedua konsep tersebut.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu prinsip yang dirancang untuk menjamin bahwa perusahaan dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, sekaligus menghormati hak-hak para pemegang saham, karyawan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Prinsip ini sangat krusial bagi perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh.

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (YY PMI, 2002, dalam Muntahanah & Murdijaningsih, 2020). Sedangkan, menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan (dalam Raihan, Rosidi, Muhsin, & Prameswara, 2025).

Manajemen Risiko Keuangan adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang mungkin terjadi. (Dwi, 2023). Dalam dunia usaha yang terus berubah dan tidak menentu, pengelolaan risiko keuangan memegang peranan penting untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Berbagai risiko seperti naik turunnya nilai mata uang, perubahan tingkat bunga, kegagalan pembayaran dari pelanggan, hingga keputusan investasi yang kurang tepat bisa memberikan dampak serius terhadap kondisi keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki pendekatan manajemen risiko yang sistematis dan berkesinambungan. Melalui strategi yang tepat, risiko-risiko tersebut tidak hanya dapat diminimalkan, tetapi juga

membuka peluang bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih aman dan terarah, bahkan di tengah tekanan pasar yang tinggi.

Mitigasi risiko adalah proses yang melibatkan pengenalan, analisis, penilaian, dan pengelolaan risiko yang ada dalam suatu perusahaan. Risiko sendiri adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga mitigasi sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk tersebut. (Zega, 2023). Berikut jenis-jenis Risiko Keuangan:

a. Risiko Keuangan

Risiko keuangan mengacu pada potensi kerugian secara langsung terhadap aset atau posisi keuangan perusahaan. Jenis risiko ini dapat muncul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditas, fluktuasi nilai aset, perubahan kurs mata uang, maupun pergerakan suku bunga. Beberapa bentuk dari risiko keuangan di antaranya:

- a) Risiko Kredit: Merupakan risiko yang muncul ketika pihak pemberi pinjaman, seperti lembaga keuangan, tidak berhasil memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada debitur. Beban dari risiko ini biasanya ditanggung oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.
- b) Risiko Likuiditas: Terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek karena kesulitan dalam mengonversi aset menjadi kas secara cepat.
- c) Risiko Pasar: Risiko ini muncul akibat aktivitas jual beli aset di pasar keuangan, seperti surat berharga. Faktor penyebabnya bisa berasal dari dinamika internal (mikro) maupun kondisi ekonomi secara umum (makro). Risiko pasar ini dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi risiko pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas atau bahan baku.
- d) Risiko Suku Bunga: Terjadi sebagai akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga di pasar, yang dapat memengaruhi pendapatan atau biaya lembaga keuangan.
- e) Risiko Nilai Tukar: Merupakan risiko kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing, terutama ketika perusahaan melakukan transaksi internasional atau investasi dalam bentuk valuta asing.

b. Risiko Bisnis

Risiko bisnis mengacu pada potensi kerugian yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan, seperti kondisi ekonomi, perubahan regulasi, atau kebijakan pemerintah. Jenis risiko ini mencakup:

- a) Risiko Reputasi: Risiko ini muncul ketika kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan menurun, baik karena kejadian nyata maupun opini yang berkembang di masyarakat.
- b) Risiko Fidusia: Merupakan risiko ketika perusahaan kehilangan kepercayaan pihak ketiga dalam mengelola aset atau dana. Misalnya, nasabah yang menarik simpanannya dari suatu lembaga karena merasa tidak puas dengan pengelolaan dana sebelumnya.
- c) Risiko Hukum: Terkait dengan adanya ketidakpastian atau permasalahan dalam aspek hukum dan regulasi yang dapat memengaruhi kegiatan usaha. Risiko ini bisa bersumber dari faktor internal perusahaan maupun eksternal seperti perubahan undang-undang.
- d) Risiko Negara: Risiko ini timbul akibat kondisi politik, sistem hukum, budaya, atau peraturan yang berlaku di suatu negara, yang dapat berdampak pada operasional dan keberlanjutan usaha, terutama dalam skala internasional. (Gojali, 2022)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis dan memahami peran tata kelola perusahaan dalam mitigasi risiko keuangan berdasarkan informasi dan data yang telah tersedia dari berbagai sumber ilmiah. Fokus penelitian terletak pada pengumpulan dan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk jurnal ilmiah dan artikel terpercaya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui platform seperti Google Scholar, ResearchGate, serta portal jurnal dari universitas dan institusi akademik lainnya. Sumber-sumber yang dipilih adalah yang memuat pembahasan terkait konsep tata kelola perusahaan, prinsip manajemen risiko, serta berbagai pendekatan dalam mitigasi risiko keuangan.

Setelah mengumpulkan sejumlah literatur, peneliti melakukan penyaringan berdasarkan kesesuaian topik, keterkinian sumber, dan kualitas publikasi. Artikel dan jurnal yang dipilih adalah yang secara langsung membahas hubungan antara praktik tata

kelola dan manajemen risiko keuangan dalam konteks perusahaan. Selain itu, peneliti juga memperhatikan apakah sumber tersebut menggunakan pendekatan akademik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penelaahan isi dari literatur yang telah terseleksi. Peneliti membaca secara mendalam isi jurnal dan artikel untuk mengidentifikasi poin-poin penting yang mendukung kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara naratif isi dari berbagai sumber dan mengaitkannya dengan fokus penelitian. Proses ini mencakup pemahaman terhadap teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu, temuan yang relevan, dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung argumen dalam penelitian ini.

Melalui metode ini, peneliti juga dapat menelusuri bagaimana tren pemikiran mengenai manajemen risiko dan tata kelola perusahaan berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, peneliti mengidentifikasi adanya celah atau keterbatasan dari studi-studi sebelumnya yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan kontribusi dari penelitian ini. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bersifat mengulang, tetapi juga berupaya memberikan nilai tambah melalui penyusunan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

Secara keseluruhan, penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan sintesis dari berbagai pandangan ilmiah mengenai bagaimana tata kelola perusahaan dapat membantu dalam mengelola dan mengurangi risiko keuangan. Harapannya, hasil dari studi ini dapat memberikan gambaran teoritis yang kuat sekaligus relevan untuk diterapkan di dunia bisnis.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG)**

Prinsip pertama adalah kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha mereka, seperti hukum pasar modal, aturan ketenagakerjaan, dan peraturan lingkungan. Kepatuhan ini berfungsi sebagai fondasi yang kuat agar perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan integritas dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Selanjutnya, prinsip transparansi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, lengkap, dan jujur kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkaitan. Informasi seperti laporan keuangan, kebijakan internal, dan keputusan penting perusahaan

harus dibuka secara berkala. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan atas keputusan dan tindakannya. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk manajemen tingkat atas, tetapi juga untuk seluruh bagian dalam organisasi. Dengan adanya akuntabilitas, proses pengambilan keputusan akan lebih tertata dan risiko penyalahgunaan wewenang bisa dikurangi.

Lalu, ada juga prinsip kejelasan peran yang menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas dalam perusahaan. Peran antara pemilik saham, dewan direksi, dan manajemen harus dibedakan secara tegas agar tidak terjadi konflik kepentingan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu, perusahaan juga harus mengutamakan kepentingan pemegang saham. Ini bisa terlihat dari keputusan perusahaan yang mendukung pertumbuhan nilai saham jangka panjang, serta pembagian hasil usaha yang adil sesuai kontribusi modal yang diberikan.

Namun, perhatian tidak hanya diberikan kepada pemegang saham saja. GCG juga mendorong perusahaan untuk memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan menjamin keberlanjutan usaha mereka.

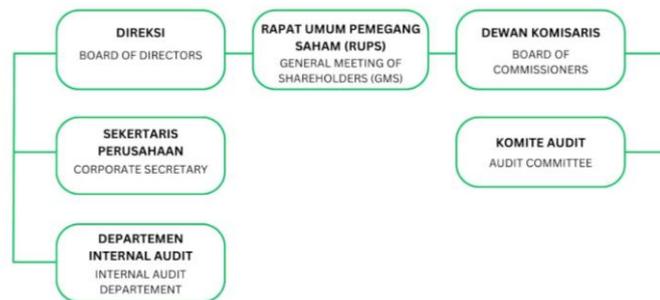
Salah satu bentuk nyata dari penerapan prinsip transparansi adalah melalui pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuangan mereka, agar bisa dinilai secara objektif oleh semua pihak yang berkepentingan.

Terakhir, perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan yang efektif. Dewan direksi harus memastikan bahwa seluruh proses dalam perusahaan berjalan sesuai rencana, termasuk dengan melibatkan audit internal maupun eksternal. Pengawasan ini bertujuan agar perusahaan tetap berada di jalur yang benar dan potensi masalah bisa segera ditangani.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia memberikan arahan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka secara etis, bertanggung jawab, dan profesional. Penerapan GCG secara konsisten mampu menciptakan lingkungan usaha yang sehat, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang. (PPAK, 2023)

## Struktur Tata Kelola Perusahaan

PT. Data Sinergitama Jaya Tbk, yang lebih dikenal dengan nama Elitery, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi, dengan fokus pada layanan pusat data virtual atau yang biasa dikenal sebagai cloud computing. Sebagai perusahaan terbuka, Elitery memiliki struktur tata kelola yang terorganisir, yang mencerminkan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Pembagian peran yang jelas antar bagian dalam perusahaan menjadi salah satu bentuk nyata dari implementasi GCG.



**Gambar 1.** Bagan struktur Tata Kelola Perusahaan PT. Data Sinergitama Jaya Tbk

(Sumber:PT. Data Sinergitama Jaya Tbk, n.d.)

Salah satu organ penting dalam struktur tersebut adalah Dewan Komisaris. Dewan ini berfungsi untuk mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris diharapkan memahami situasi internal perusahaan, bersikap objektif dan independen dalam mengambil keputusan, serta dapat memberikan saran atau pertimbangan strategis yang membantu manajemen menghadapi berbagai tantangan bisnis. Keberadaan Dewan Komisaris menjadi penyeimbang bagi kegiatan operasional agar tetap berada pada jalur yang sehat dan terarah.

Sementara itu, Direksi bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan secara langsung, termasuk dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang telah disusun. Direksi memiliki kewenangan penuh dalam urusan operasional dan mewakili perusahaan dalam urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar. Peran Direksi sangat penting dalam memastikan tujuan perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang efisien dan sesuai aturan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, Elitery juga memiliki Komite Audit. Komite ini berada di bawah Dewan Komisaris dan bertugas untuk membantu dalam memantau dan menilai berbagai aspek penting, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan, kegiatan audit internal maupun eksternal, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi Komite Audit membantu menjaga keandalan informasi keuangan dan meningkatkan transparansi perusahaan.

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan menjadi bagian yang menghubungkan perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal maupun internal. Posisi ini berada di bawah Direksi dan menjalankan peran sebagai compliance officer, yakni memastikan perusahaan senantiasa memenuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga keterbukaan informasi dan reputasi perusahaan di mata publik.

Melalui struktur organisasi yang demikian, Elitery menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pembagian peran yang terstruktur bukan hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang sehat, sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. (PT Data Sinergitama Jaya Tbk., n.d.).

### **Tahapan dalam Mitigasi Risiko Keuangan**

- 1) Identifikasi risiko: Tahap awal adalah mengenali berbagai risiko yang mungkin muncul dalam perusahaan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai aspek, seperti lingkungan, keuangan, reputasi, dan lainnya. Pada tahap ini penting untuk Perusahaan mengidentifikasi berbagai tipe risiko yang umum ditemui, terutama yang berkaitan dengan aspek keuangan dan bisnis.
- 2) Analisis risiko: Setelah risiko dikenali, tahap selanjutnya adalah menganalisis risiko tersebut guna menilai potensi dampaknya terhadap perusahaan. Proses ini membantu menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu.
- 3) Evaluasi risiko: Pada tahap ini, perusahaan mengevaluasi apakah risiko yang ada masih dapat diterima atau harus segera dikelola. Risiko yang tidak dapat diterima wajib mendapat penanganan lebih cepat.
- 4) Pengelolaan risiko: Setelah penilaian dilakukan, perusahaan memilih strategi pengelolaan yang sesuai, seperti menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima risiko.

- 5) Pemantauan dan evaluasi: Terakhir, perusahaan secara berkala memantau dan mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi dan strategi pengelolaannya untuk memastikan efektivitas dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. (Dwi, 2023).

### **Bagaimana Tata Kelola Perusahaan Membantu Mitigasi Risiko Keuangan**

Tata kelola perusahaan yang baik, atau yang biasa disebut Good Corporate Governance (GCG), sangat berperan dalam membantu perusahaan mengelola dan mengurangi risiko keuangan. Risiko keuangan bisa muncul dari berbagai sumber, seperti ketidakstabilan arus kas, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi, atau pengawasan yang kurang terhadap penggunaan dana perusahaan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG seperti keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab, serta pembagian peran yang tepat, perusahaan dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang terorganisir dan dapat dipercaya. Struktur organisasi yang jelas dan pengawasan internal yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengenali risiko lebih awal dan menanganinya dengan tepat.

Salah satu cara GCG berkontribusi dalam mengendalikan risiko keuangan adalah melalui pelaporan keuangan yang transparan. Ketika laporan keuangan disusun secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, pemangku kepentingan seperti investor, pemegang saham, dan auditor dapat memantau kondisi keuangan perusahaan dengan baik. Hal ini mendorong manajemen agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana, terutama terkait utang dan investasi. Selain itu, audit internal dan eksternal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan peraturan dan meminimalisir potensi penyalahgunaan.

Prinsip akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam mitigasi risiko. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas di setiap bagian perusahaan, maka setiap keputusan yang diambil dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Hal ini membantu mencegah keputusan yang berisiko dan merugikan perusahaan. Struktur organisasi yang jelas juga mendukung koordinasi antar bagian sehingga keputusan dibuat berdasarkan data dan analisis yang valid, bukan berdasarkan asumsi atau kepentingan pribadi.

Sebagai contoh penerapan tata kelola yang efektif, perusahaan biasanya membentuk komite audit yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Komite ini bertugas menelaah laporan keuangan dan mengawasi proses audit internal serta eksternal. Selain itu, banyak perusahaan juga memiliki unit manajemen risiko yang fokus

pada identifikasi risiko dan penyusunan strategi untuk pencegahannya. Dengan adanya pengawasan yang menyeluruh seperti ini, perusahaan menjadi lebih siap dalam menghadapi risiko dan menjaga kestabilan keuangan jangka panjang.

### **Peran dan Kebijakan Pemerintah**

Pemerintah memiliki peran penting dalam membantu dunia usaha menerapkan tata kelola yang baik, terutama untuk mencegah atau mengurangi risiko keuangan. Risiko ini bisa muncul dari banyak hal, seperti kondisi pasar yang tidak menentu, kesalahan manajemen, atau penggunaan dana yang tidak tepat. Untuk menghadapinya, pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN mengeluarkan berbagai aturan yang bertujuan agar perusahaan menjalankan usaha dengan cara yang transparan, akuntabel, dan penuh kehati-hatian.

Contohnya, lewat aturan OJK tentang tata kelola untuk bank umum, perusahaan di bidang keuangan diminta untuk memiliki sistem pengawasan yang baik serta manajemen risiko yang kuat. Aturan ini mendorong perusahaan untuk membentuk struktur organisasi yang rapi, membuat laporan keuangan secara rutin dan jujur, serta membentuk tim audit dan divisi khusus untuk mengelola risiko. Dengan sistem ini, perusahaan jadi lebih siap menghadapi masalah keuangan yang tidak terduga dan bisa menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Di sektor BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 menegaskan pentingnya perusahaan milik negara menjalankan bisnis dengan tata kelola yang sehat. Salah satu poin penting dari aturan ini adalah kewajiban perusahaan untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang jelas. Tujuannya, agar setiap langkah bisnis yang diambil tidak membawa kerugian besar baik bagi perusahaan maupun bagi negara. (Nabilla, & Suherman, 2024)

Selain itu, Kementerian Keuangan melalui DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) juga aktif menyuarakan pentingnya pengelolaan risiko dalam keuangan negara. Mereka mendorong perencanaan keuangan yang matang dan bertanggung jawab agar APBN tetap aman dan stabil.

Secara keseluruhan, regulasi dan kebijakan dari pemerintah ini membantu perusahaan untuk membangun sistem yang lebih tertib dan profesional. Dengan adanya panduan dari pemerintah, perusahaan bisa lebih siap menghadapi risiko dan menjaga bisnis tetap berjalan dengan sehat. Bisa dibayangkan, kebijakan pemerintah sangat mendukung terciptanya lingkungan usaha yang kuat dan berkelanjutan.

## **Studi Kasus**

Pengelolaan risiko keuangan dapat dilihat dari kasus kebangkrutan yang dialami oleh sebuah perusahaan ritel mainan besar asal Amerika Serikat, perusahaan Toys “R” Us adalah contoh perusahaan yang mengalami masalah keuangan serius hingga akhirnya harus menutup sebagian besar tokonya pada tahun 2018. Sebelumnya, pada September 2017, perusahaan ini resmi mengumumkan kebangkrutan. Salah satu penyebab utama kesulitan finansial mereka adalah utang yang sangat besar, sekitar 5 miliar dolar, yang muncul dari pembelian perusahaan tersebut pada tahun 2005 dengan cara menggunakan dana pinjaman sebesar 6,6 miliar dolar.

Penurunan pendapatan yang signifikan dan beban utang yang tinggi membuat perusahaan menghadapi tekanan likuiditas, yakni kesulitan mendapatkan uang tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini terlihat dari kesulitan mereka menjual aset properti untuk menambah dana. Akibatnya, Toys “R” Us terpaksa menutup 735 toko di Amerika Serikat agar dapat mengurangi beban keuangannya.

Setelah proses kebangkrutan, sejumlah kreditur mengambil alih perusahaan dan mulai merancang langkah-langkah untuk menghidupkan kembali bisnis Toys “R” Us. Pada tahun 2019, perusahaan baru yang dipimpin oleh mantan eksekutif, Tru Kids Brands, memulai pembukaan kembali toko-toko dengan merek yang sama. Selain itu, kerja sama dengan Macy’s dan WHP Global juga dilakukan guna mendukung kebangkitan merek tersebut di pasar.

Kisah Toys “R” Us ini menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk menjaga kelangsungan usaha. Beban utang yang besar tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan masalah likuiditas hingga akhirnya menyebabkan kegagalan perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko tersebut dan memastikan perusahaan tetap bertahan di tengah tantangan bisnis. (Verma, 2025)

## **5. KESIMPULAN**

Dari hasil penelaahan terhadap sejumlah literatur, dapat ditarik kesimpulan bahwa Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik memiliki peran penting dalam mengendalikan risiko keuangan yang berpotensi menghambat kinerja dan stabilitas perusahaan. Risiko keuangan sendiri merupakan ancaman yang bisa muncul dari berbagai sisi, baik dari dalam maupun luar perusahaan, seperti perubahan ekonomi, fluktuasi pasar, hingga kesalahan pengambilan keputusan. Karena itu, diperlukan

pengelolaan risiko yang terstruktur dan efektif. Di sinilah tata kelola perusahaan berperan penting sebagai sistem pengarah dan pengendali.

Pelaksanaan GCG yang mencerminkan nilai transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, dan keadilan akan memperkuat proses pengambilan keputusan dan meminimalkan praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan perusahaan. Selain prinsip tersebut, struktur organisasi yang baik—meliputi dewan komisaris, direksi, dan komite audit—juga menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tata kelola yang terencana akan mempermudah perusahaan untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons risiko keuangan lebih cepat dan tepat.

Proses mitigasi risiko keuangan mencakup langkah-langkah seperti pengenalan risiko, evaluasi tingkat ancaman, penentuan langkah pengendalian, dan pemantauan secara berkala. Ketika proses ini berjalan beriringan dengan sistem tata kelola yang solid, maka efektivitas pengelolaan risiko pun meningkat. Selain itu, keberadaan regulasi dan dukungan pemerintah, terutama melalui kebijakan pengawasan dan pelaporan yang transparan, turut mendukung upaya perusahaan dalam membangun sistem yang lebih tangguh terhadap risiko. Dari studi literatur yang dianalisis, perusahaan dengan GCG yang diterapkan secara konsisten terbukti memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi situasi keuangan yang penuh ketidakpastian.

Dari hasil kajian ini, penulis menyarankan agar penerapan GCG tidak hanya dijadikan kewajiban administratif, melainkan benar-benar dijalankan sebagai budaya kerja yang menyatu dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Kesadaran manajemen terhadap pentingnya tata kelola akan membantu perusahaan menghadapi potensi risiko keuangan secara lebih bijaksana dan terencana. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik jika dilakukan pendekatan perbandingan antar industri atau studi kasus lapangan agar dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi tata kelola dalam konteks pengelolaan risiko keuangan secara langsung.

## REFERENSI

- Dwi, A. (2023). *Manajemen risiko keuangan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis UMSU. Diakses dari <https://feb.umsu.ac.id/manajemen-risiko-keuangan>
- Elitery. (n.d.). *Struktur tata kelola & kebijakan perusahaan*. Elitery. Diakses dari <https://ir.elitery.com/tata-kelola-perusahaan-gcg/>
- Gojali, D. (2022). Manajemen risiko keuangan dalam tinjauan Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(1), 182–183.
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2020). Peran tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan pertambangan di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 235.
- Nabilla, & Suherman. (2024). Tata kelola BUMN berdasarkan prinsip good corporate governance. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), 211.
- PPAK VClass. (2023). *Prinsip-prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik*. Diakses dari <https://vclass.ppak.co.id/news/baca/Prinsip-prinsip-Utama-Tata-Kelola-Perusahaan-yang-Baik>
- PT Data Sinergitama Jaya Tbk. (n.d.). *Tata kelola perusahaan (GCG)*. Elitery. Diakses dari <https://ir.elitery.com/tata-kelola-perusahaan-gcg/>
- Raihan, N. Y., Rosidi, I. J., Muhsin, A. A., & Prameswara, M. D. (2025). Peran tata kelola perusahaan dalam pencegahan benturan kepentingan: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 3(1), 86–87.
- Sipayung, B. (2023). Pengaruh manajemen keuangan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan di PT. XYZ. *Jurnal Sanskara Akuntansi dan Keuangan (SAK)*, 1(3).
- Verma, E. (2025). What is financial risk and its types? Everything you need to know. *Simplilearn*. Diakses dari <https://www.simplilearn.com/financial-risk-and-types->
- Zega, K. J. T. (2024). Tata kelola perusahaan yang baik sebagai mitigasi risiko manajemen kinerja organisasi. *Jurnal Manajemen Risiko*, 120–121.